

ASISTENSI BANTUAN PEMERINTAH PENDAMPINGAN KURIKULUM 2013 TAHUN 2017

Oleh: Bram Warmaya Lubis, S.Pd

Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan

Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Pengawas, Kepala Sekolah, dan Guru di Provinsi Papua Barat telah dilaksanakan secara bertahap, periode April-Juni tahun 2017. Pembekalan Kompetensi awal menjadi dasar bagi sekolah pelaksana kurikulum 2013 tahun 2017 dalam

mengimplementasikan Kurikulum 2013 di Provinsi Papua Barat.

Dinamika Perubahan Kurikulum sebagai salah satu upaya perbaikan dan peningkatan standar pendidikan menjadi hal yang sepatutnya menjadi perhatian semua pihak, dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Papua Barat bersama Dinas Pendidikan daerah bekerjasama secara maksimal sehingga Pelatihan Kurikulum 2013 bisa berjalan dengan baik.

Bantuan Pemerintah

Sebagaimana kita ketahui bersama, Pelatihan Kurikulum 2013 memang terasa belum melengkapi keingintahuan dan Kompetensi diri dalam rangka Implementasi kurikulum 2013 di sekolah, oleh karena itu dalam program kerjanya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui LPMP Papua Barat tidak hanya bertugas untuk melaksanakan pelatihan, namun juga melakukan pendampingan bagi sekolah pelaksana kurikulum 2013 tahun 2017.



Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, jika dalam pelatihan, sekolah hanya bertindak sebagai peserta, maka, dalam pendampingan, Sekolah bertindak sebagai penyelenggara dan peserta, dalam hal ini, sekolah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendampingan secara mandiri baik secara Internal maupun berkelompok dengan sekolah lain,, guna mendukung Implementasi kurikulum 2013 di sekolah masing-masing. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah memberikan Bantuan berupa Dana, yang dapat digunakan bagi sekolah masing-masing, sehingga Implementasi Kurikulum 2013 lebih efektif dan efisien, sebagaimana tertuang dalam Tujuan umum petunjuk pelaksanaan bantuan pemerintah Pendampingan pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah sasaran tahun 2017. Selanjutnya disebutkan bahwa

"Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 adalah dana bantuan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada sekolah inti/induk klaster dan sekolah imbas melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk penyelenggaraan pendampingan pelaksanaan kurikulum yang bersumber dari dana APBN",

Jelaslah bahwa bantuan yang diberikan berupa dana yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pendampingan pelaksanaan Kurikulum, bukan yang "lain", Karena dana sekecil apapun, tetap harus dipertanggungjawabkan, sebagaimana disampaikan oleh Kepala LPMP Papua Barat dalam acara **Asistensi**

No	Jenjang	Jumlah Sekolah Sasaran	Jumlah Sekolah Inti/Klaster
1	SD	364	36
2	SMP	100	19
3	SMA	44	13
4	SMK	17	9

Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 bagi sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Provinsi Papua Barat Tahun 2017, di Hotel Waigo Kota Sorong, pada tanggal 09-11 Agustus 2017, dihadapan para peserta yang terdiri dari Kepala Sekolah Induk Klaster Penerima Bantuan, Beliau menyampaikan Hak dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah Induk Klaster yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan sebagai Penerima sekaligus Koordinator Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 di daerahnya masing-masing, Dalam Kesempatan tersebut, turut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 antara LPMP Papua Barat dengan Sekolah Induk Klaster, dalam Hal ini, Nota Kesepahaman ditandatangani dan diserahkan langsung oleh Kepala LPMP Papua Barat kepada Kepala Sekolah Induk Klaster.

Dana Bantuan Pemerintah ditujukan bagi Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 tahun 2017 yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Selanjutnya, Dana Bantuan Pemerintah di salurkan melalui Sekolah Induk Klaster yang telah ditunjuk oleh dinas





pendidikan, sebagaimana tertuang dalam petunjuk pelaksanaan bantuan pemerintah Pendampingan pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah sasaran tahun 2017

"Sasaran Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 adalah sekolah inti/induk klaster dan sekolah imbas yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai sekolah pelaksana Kurikulum 2013. Penerima Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 adalah sekolah yang telah ditetapkan sebagai sekolah inti/sekolah induk klaster oleh Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota".

Berdasarkan hal tersebut, berikut jumlah sekolah sasaran dan Sekolah Induk Klaster Penerima dana bantuan pemerintah pendampingan kurikulum 2013 Provinsi Papua Barat Tahun 2017 :

Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 diberikan untuk memfasilitasi Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 di sekolahnya masing-masing, Penggunaan dana secara efektif dan efisien menjadi dasar optimisme terselenggaranya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, Pengawasan menjadi hal yang sudah seharusnya dilaksanakan oleh semua pihak terkait, hal ini juga berkaitan dengan Penumbuhan Nilai-Nilai Karakter di dunia pendidikan yang selaras dengan agenda utama yang tertuang dalam Kurikulum 2013, Integritas, Kejujuran, Kerja keras dan Gotong Royong menjadi hal yang sudah seharusnya kita tumbuh dan jaga bersama demi Peningkatan Mutu Pendidikan di Papua Barat khususnya dan Indonesia umumnya, Semoga ☺

